

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 serta dokumen Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini, adalah sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Nganjuk, 15 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK



ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns.M.Kes
Pembina

NIP. 19760804 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan	1
a. Gambaran Umum/Latar Belakang.....	1
b. Landasan Hukum.....	2
c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	2
d. Isu-isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi	9
e. Sistematika Penulisan.....	12
Bab II Perencanaan Kinerja	13
a. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja.....	13
b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan.....	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	51
Bab IV Penutup	63

BAB I

PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum/Latar Belakang

Dalam mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan Pengukuran Kinerja; Pengumpulan Data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) merupakan tahapan terakhir dalam Sistem Akuntabilitas Pemerintah

b. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

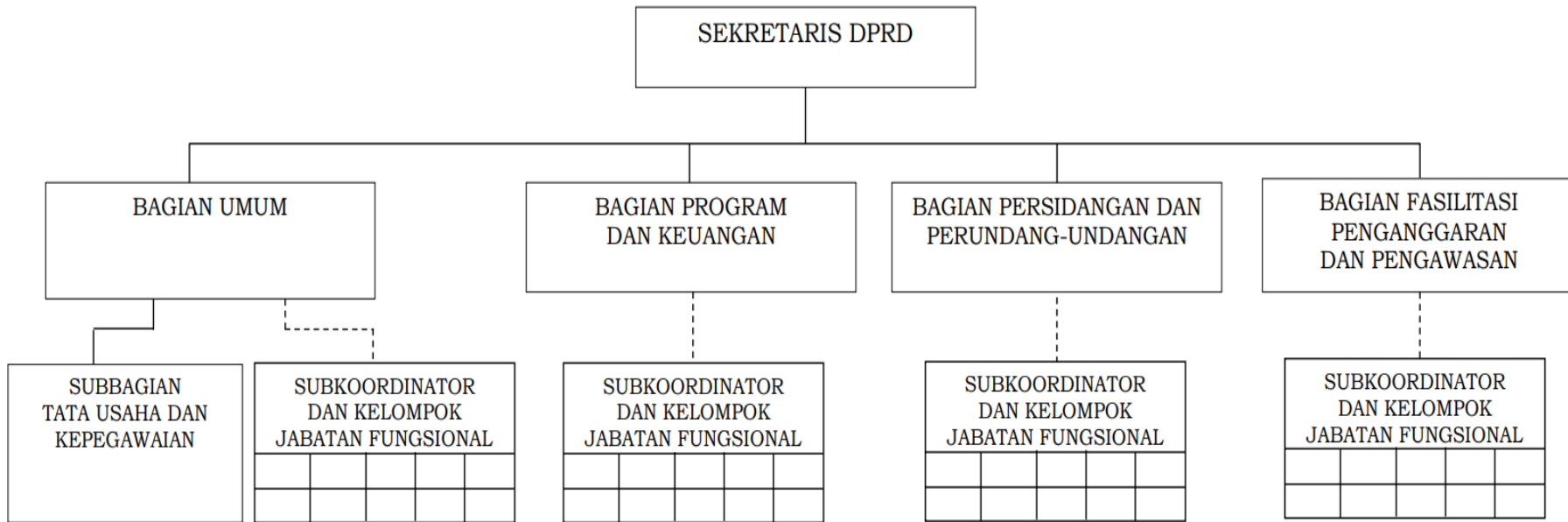
c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai kedudukan yang strategis yakni Unit pelayanan kepada Lembaga Legislatif daerah yang merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Sekretariat DPRD digambarkan sebagai berikut :

Peraturan Bupati Nganjuk No. 06 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Nganjuk

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK**



c.1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk pada Tahunan adalah 23 orang. Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah :

Tabel I.A.1
Data Administrasi Kepegawaian
Menurut Golongan dan Jabatan

U R A I A N	Satuan	Jumlah
a. Jumlah PNS		
1) Golongan I	Orang	1
2) Golongan II	Orang	4
3) Golongan III	Orang	13
4) Golongan IV	Orang	5
Jumlah	Orang	23
b. Jumlah Pejabat Struktural		
1) Eselon II	Orang	1
2) Eselon III	Orang	4
3) Eselon IV/Sub Koordinator	Orang	5
c. Jumlah Staf PNS	Orang	13
Jumlah	Orang	23

Sedangkan data pegawai menurut jenjang pendidikan yang pernah dilalui adalah :

Tabel I.A.2.
Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan

No	U R A I A N	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	1
3	Lulusan SLTA	Orang	4
4	Lulusan D2	Orang	-
5	Lulusan D3	Orang	-

6	Lulusan S-1/D4	Orang	9
7	Lulusan Pasca Sarjana / S-2	Orang	9
8	Lulusan Pasca Sarjana / S-3	Orang	-
Jumlah		Orang	23

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang berstatus PNS pada tahun 2023 sebanyak 23 orang.

c.2. Tugas dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

2 . Fungsi

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 dan diubah terakhir Peraturan Bupati Nomor 6

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1 Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- b. melaksanakan kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;

- h. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD;
- i. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Sekretariat DPRD; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Program dan Keuangan Bagian Program dan Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD. Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- h. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- i. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- l. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- m. pelaksanaan analisis laporan kinerja sekretariat DPRD; pelaksanaan analisis laporan keuangan sekretariat DPRD; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persidangan serta menyusun produk hukum daerah sesuai kewenangan DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif;
- d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- f. penyusunan risalah rapat;
- g. pelaksanaan koordinasi pembahasan Raperda;
- h. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- j. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- k. penyelenggaraan publikasi;
- l. penyelenggaraan keprotokolan;
- m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Sekretaris DPRD;
- n. pelaksanaan fasilitasi penerimaan tamu; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;

- b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/APBDP;
- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
- m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

d. ISU STRATEGIS (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid

dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan

Visi Kepala daerah dan Wakil Daerah Terpilih Adalah Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho) Dan memiliki Misi Sebagai Berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional, dan accountable demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna;
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata;
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 2 (dua) yaitu : “Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional, dan accountable demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan penyelenggaraan

pemerintah daerah yang bersih, professional dan akuntabel dalam mewujudkan pelayanan public yang partisipatif, berkualitas dan pro rakyat“ dan sasaran "Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”. Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk pada Review Rencana strategis Tahun 2018-2023 Menetapkan tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”. Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Sekretariat DPRD merupak Unsur Pendukung Pemerintah Daerah yang memiliki Fungsi Pelayanan terhadap DPRD, maka dalam Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada Tujuan Perangkat Daerah yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.” dan Sasaran “Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD” serta memiliki indikator target dalam pengukuran yaitu :

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD;
2. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah;
3. Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk secara manajerial kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan :

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
2. Merupakan media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan

4. Merupakan media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

d. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- a. Gambaran Umum/Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- d. Isu-isu Strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi
- e. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

- a. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja
- b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Sasaran, Tujuan, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.
2. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ini antara lain adalah :

1. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Untuk pedoman tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;

3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk berikutnya.

Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perangkat DPR / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Nilai

Tabel 2.2**Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Nilai
		Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	100	Persen
		Persentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat	100	Persen

Tabel 2.3**Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD	100	Persen
		Jumlah Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD	1	Dokumen
		Jumlah Rencana Kerja Bulanan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD	12	Dokumen

b. Perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Nganjuk dan Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	1. Indek kepuasan Masyarakat (DPRD)	Baik
		2. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	100 %
		3. Prosentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %
PROGRAM			
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.40.638.442.523	APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp.41.072.913.600	APBD
	JUMLAH	Rp. 81.711.356.123	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam Bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil Survey Kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk serta Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk melalui E-Sukma	Baik
		Persentase pencapaian prolegda	Jumlah Raperda yang dibahas : Jumlah Raperda yang disahkan x 100%	100 %
		Persentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat	Jumlah jaringan masyarakat difasilitasi : Jumlah seluruh jaring masyarakat x 100%	100 %

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan (n)

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk. Pencapaian kinerja terhadap sasaran-sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %/Nilai
1. Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	87,26
	2.	Prosentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	100%	75 %	75 %
	3.	Prosentase fasilitasi jaring aspirasi	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatkannya kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - i. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, merupakan indikator yang menggambarkan upaya Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan meningkatkan dukungan bagi kapasitas kinerja DPRD, Dari Aplikasi Sukma E-Jatim di Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk didapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 87,26. Angka yang berarti Kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk kepada Masyarakat/Pengguna layana Berkinerja Pelayanan "Baik". Hal Ini Menunjukkan bahwa Kinerja Secara umum dalam kategori Baik.

ii. Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda merupakan indikator yang menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan produk hukum . Capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai berikut :

- Jumlah raperda yang disediakan tahun 2023 : 8 Raperda
- Target presentase raperda yang ditetapkan : 6 perda
Menjadi perda pada tahun 2023
- Realisasi presentase raperda yang ditetapkan : 75 %
Menjadi perda tahun 2023

Adapun Raperda yang telah dibahas dan di sahkan :

No.	Raperda yang dibahas	Perda yang disahkan/telah dibahas
1.	Raperda Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	Perda Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah
3	Raperda Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan	Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2022
4	Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2022	Perda APBD TA. 2024
5	Raperda APBD TA. 2024	Perda P.APBD TA. 2023
6	Raperda P.APBD TA. 2023	Perda Pajak dan Retribusi Daerah
7	Raperda Pajak dan Retribusi Daerah	
8	Raperda tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa	

Kendala terdapat dikarenakan terjadi keterlambatan dalam Fasilitasi oleh Biro Hukum Propinsi Jawa Timur dengan alasan Kekurangan SDM pada Biro Hukum Propinsi Jawa Timur, hal ini akan berimbas pada Pengesahan Raperda menjadi Perda. Dari Sekretariat DPRD sudah berkinerja Maksimal dalam Memfasilitasi DPRD dalam Penyusunan Raperda mulai dari Pembahasan dan Penyediaan Tenaga Ahli Naskah Akademis yang berkaitan dengan Penyusunan Raperda. Dikarenakan Pengesahan yang harus melalui Fasilitasi oleh Biro Hukum Propinsi Jawa Timur, maka penghitungan target melibatkan pihak lain.

iii. Persentasi fasilitasi jaring aspirasi masyarakat, merupakan indikator yang menggambarkan upaya dari legislative dalam menciptakan jaring aspirasi masyarakat di setiap daerah pilihan masing-masing Anggota DPRD, capaian kinerja di tahun 2023 jika dilihat dari realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Fasilitasi jaring aspirasi dilaksanakan melalui kegiatan Reses DPRD sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Adapun Jaringan Aspirasi Masyarakat dengan Jumlah Sebagai Berikut :

- Kegiatan Reses Pertama : 566 Usulan Aspirasi
- Kegiatan Reses Ke Dua : 529 Usulan Aspirasi
- Kegiatan Reses ke tiga : 505 Usulan Aspirasi

Dengan Jumlah 1600 tersebut dengan merupakan target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Aspirasi tersebut dituangkan dalam Pokok Pikiran DPRD Kab. Nganjuk yang di paripurnakan disampaikan kepada Bupati Nganjuk dan diEntry dalam SIPD.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI KINERJA		
		Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)
1. Meningkatnya kepuasan	1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET			REALISASI KINERJA		
			Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)
Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD						
	2.	Prosentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	100%	100 %	100 %	64%	67 %	75 %
	3.	Prosentase fasilitasi jaring aspirasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan target Akhir pada Dokumen Renstra

**Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra**

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.1.3.2
Target Kinerja Renstra

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64%	67%	75%	100%	100%	64%	67%	75%
3.	Persentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.1.3.2 Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk berkaitan dengan Indikator yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dari Tahun 2019 s.d 2022 dengan Nilai Baik rata-rata dengan nilai 80 keatas, akan tetapi mengingat Sekretariat DPRD yang sifatnya Pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD makanya perlu kami tingkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, dan Indikator kedua yaitu Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah pada hakekatnya Sekretariat DPRD memfasilitasi dalam penyusunan Naskah Akademis sebelum dibentuk Panitia Khusus Rancangan Perda, serta Pembahasan Raperda dan Fasilitasi Tim Ahli AKD yang berkaitan dengan setelah Pembahasan Raperda oleh Pansus DPRD, kenapa tidak tersampainya Target hal ini disebabkan oleh Fasilitasi Raperda oleh Biro Hukum Propinsi Jawa Timur terlambat turun melebihi batas yang ditentukan sehingga menghambat Raperda Untuk disahkan oleh Perda. Serta Indikator ke tiga yaitu Persentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat walaupun pada kenyataannya target dan realisasi ada kesesuaian yaitu 100%, karena hasil Reses yaitu Aspirasi Masyarakat tertuang pada Paripurna Hasil Reses dan teriput ke SIPD yang berkaitan dengan Pokok-pokok Pikiran.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (n) dengan Standar Nasional

Tabel 3.1.4

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Propinsi	Realisasi
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80	87,18	87,26

A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Tabel 3.1.5

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak tercapai
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100	Tercapai
		Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	75	Tidak Tercapai
		Persentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat	100	Tercapai

Kendala Indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah dikarenakan terjadi keterlambatan dalam Fasilitasi oleh Biro Hukum Propinsi Jawa Timur dengan alasan Kekurangan SDM pada Biro Hukum Propinsi Jawa Timur, hal ini akan berimbas pada Pengesahan Raperda menjadi Perda. Dari Sekretariat DPRD sudah berkinerja Maksimal dalam Memfasilitasi DPRD dalam Penyusunan Raperda mulai dari Pembahasan dan Penyediaan Tenaga Ahli Naskah Akademis yang berkaitan dengan Penyusunan Raperda. Dikarenakan Pengesahan yang

harus melalui Fasilitasi oleh Biro Hukum Propinsi Jawa Timur, maka penghitungan target melibatkan pihak lain

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat DPR / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100	92,51	7,49

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100	92,51	7,49
		Prosentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	75	89,24	-14,24
		Prosentase fasilitasi jaring aspirasi	100	97,22	2,78

Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD terdapat efisiensi sebagai berikut :

a. Indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 7,49 % hal ini dikarenakan :

1. Dalam Pelayanan DPRD khususnya dalam peningkatan Kapasitas DPRD atau Pengawasan yang dilakukan DPRD dengan melakukan Kunjungan kerja/Study Banding, Konsultasi dan Koordinasi adanya Pergeseran Tempat Kegiatan sehingga menefisiensi Anggaran;
2. Terjadi Efisiensi Anggaran dikarenakan pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas dikarenakan Pelaksanaan Menyesuaikan Undangan Bimtek Partai dan Jadwal dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang disediakan untuk memfasilitasi Pimpinan DPRD akan tetapi Pimpinan DPRD

banyak mengikuti Kegiatan Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD bersama Anggota.

Terdapat Perubahan Anggaran dari 64.988.872.032 menjadi 81.711.356.123 bertambah 16.722.484.091, hal ini guna mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota yaitu dari Segi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan.

- b. Indikator Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah didukung dan disandingkan Penyerapan Anggaran dengan Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tingkat Efisiensi Minus (-) 14,24 % dikarenakan Perhitungan melibatkan Biro Hukum Propinsi Jatim dalam Memfasilitasi Raperda sebelum disahkan menjadi Perda sehingga Sekretariat DPRD membutuhkan waktu dan bergantung kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk dan Biro Hukum Propinsi Jawa Timur dalam menentukan Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah.
- c. Indikator Prosentase fasilitasi jaring aspirasi didukung dan disandingkan dengan Penyerapan Anggaran Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tingkat Efisiensi 2,78, dikarenakan Anggota DPRD melakukan Sidak atau terjun ke Lapangan tanpa melakukan penyerapan Anggaran pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perangkat DPR / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Dokumen Perencanaan yang baik dan tepat waktu	100%
				Persentase Laporan Evaluasi yang baik dan tepat waktu`	100%
	Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			Persentase Administrasi dan Sarana serta Prasarana yang memadai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
		Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%
		Persentase fasilitasi jaring aspirasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125%
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50%
			<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Presentase Terlaksannya Adminitrasi Kepegawaian Yang Baik Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku</i>	80%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	62%
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Presentase Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Pelayanan Terhadap DPRD</i>	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	88%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan</i>	83%
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75%
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Jenis/Unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	100%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terhadap DPRD</i>	109%
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100%
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	33%
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	38%
			<i>Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100%
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perangkat DPR/Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan terhadap DPRD	109%
			<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	<i>Jumlah Presentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	75%
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100%
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	67%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	100%
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	67%
			<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pembahasan yang Berkaitan Dengan APBD dan Pertanggungjawabannya</i>	100%
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100%
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100%
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100%
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100%
			<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Jumlah Presentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Melaksanakan Kunjungan Kerja dan Konsultasi serta Rapat Rapat dan Presentase AKD</i>	100%
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100%
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100%
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Jumlah Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Guna Meningkatkan Pelayanan Terhadap DPRD/IKM Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	100%
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	100%
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100%
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100%
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100%
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	100%
			<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Jumlah Presentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Terhadap Masyarakat</i>	100%
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	17%
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100%
			<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Jumlah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	100%
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	100%
			<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>	<i>Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi yang diterbitkan</i>	100%
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Presentasi Terlaksananya Fasilitasi yang Mendukung Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD/IKM Kepuasan Pelayanan Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD</i>	109%
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0%
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100%
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100%

B. Realisasi Anggaran

Selain pertanggungjawaban kinerja utama, maka perlu kiranya dilihat sejauh mana penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dibiayai dengan anggaran APBD Tahun 2023. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 secara garis besar terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02	Sekretariat DPRD	81,711,356,123.00	75,592,564,789.00	6,118,791,334.00	92.51
4.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40,638,442,523.00	38,780,857,585.00	1,857,584,938.00	95.43
4.02 . 01 . 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	142,746,900.00	141,687,050.00	1,059,850.00	99.26
4.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,783,000.00	17,722,800.00	60,200.00	99.66
4.02 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13,690,000.00	13,646,000.00	44,000.00	99.68

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,625,400.00	15,354,250.00	271,150.00	98.26
4.02 . 01 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12,225,000.00	12,110,000.00	115,000.00	99.06
4.02 . 01 . 2.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12,340,300.00	12,035,000.00	305,300.00	97.53
4.02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,293,000.00	26,081,000.00	212,000.00	99.19
4.02 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,790,200.00	44,738,000.00	52,200.00	99.88
4.02 . 01 . 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4,236,558,400.00	3,166,031,442.00	1,070,526,958.00	74.73
4.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,089,509,500.00	3,019,219,442.00	1,070,290,058.00	73.83
4.02 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27,445,000.00	27,428,000.00	17,000.00	99.94
4.02 . 01 . 2.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	64,996,600.00	64,855,000.00	141,600.00	99.78

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
	SKPD				
4.02 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19,641,200.00	19,615,500.00	25,700.00	99.87
4.02 . 01 . 2.02 . 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19,976,100.00	19,959,500.00	16,600.00	99.92
4.02 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7,496,500.00	7,469,500.00	27,000.00	99.64
4.02 . 01 . 2.02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,493,500.00	7,484,500.00	9,000.00	99.88
4.02 . 01 . 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	144,592,050.00	136,933,910.00	7,658,140.00	94.70
4.02 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15,232,050.00	14,985,000.00	247,050.00	98.38

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129,360,000.00	121,948,910.00	7,411,090.00	94.27
4.02 . 01 . 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1,085,013,847.00	1,001,050,380.00	83,963,467.00	92.26
4.02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,005,670.00	14,318,750.00	686,920.00	95.42
4.02 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,006,707.00	99,861,250.00	2,145,457.00	97.90
4.02 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,529,431.00	21,291,681.00	3,237,750.00	86.80
4.02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216,260,419.00	204,122,805.00	12,137,614.00	94.39
4.02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	263,800,120.00	230,240,750.00	33,559,370.00	87.28
4.02 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27,000,000.00	24,165,000.00	2,835,000.00	89.50
4.02 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156,510,000.00	156,147,750.00	362,250.00	99.77

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231,040,000.00	203,146,394.00	27,893,606.00	87.93
4.02 . 01 . 2.06 . 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48,861,500.00	47,756,000.00	1,105,500.00	97.74
4.02 . 01 . 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	996,546,526.00	941,150,000.00	55,396,526.00	94.44
4.02 . 01 . 2.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	194,250,000.00	183,800,000.00	10,450,000.00	
4.02 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	43,633,500.00	43,300,000.00	333,500.00	99.24
4.02 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	758,663,026.00	714,050,000.00	44,613,026.00	94.12
4.02 . 01 . 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1,764,452,000.00	1,648,418,509.00	116,033,491.00	93.42
4.02 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	902,000.00	98,000.00	90.20
4.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338,600,000.00	288,263,285.00	50,336,715.00	85.13

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,424,852,000.00	1,359,253,224.00	65,598,776.00	95.40
4.02 . 01 . 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2,549,205,200.00	2,386,925,064.00	162,280,136.00	93.63
4.02 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	371,026,500.00	307,534,582.00	63,491,918.00	82.89
4.02 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	334,070,700.00	259,599,954.00	74,470,746.00	77.71
4.02 . 01 . 2.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	5,000,000.00	4,995,000.00	5,000.00	99.90
4.02 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71,900,000.00	65,982,650.00	5,917,350.00	91.77
4.02 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,767,208,000.00	1,748,812,878.00	18,395,122.00	98.96

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02 . 02 . 2.15	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	28,914,283,600.00	28,553,969,505.00	360,314,095.00	98.75
4.02 . 02 . 2.15 . 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	28,842,926,500.00	28,490,549,505.00	352,376,995.00	98.78
4.02 . 02 . 2.15 . 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	27,357,100.00	26,995,000.00	362,100.00	98.68
4.02 . 02 . 2.15 . 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	44,000,000.00	36,425,000.00	7,575,000.00	82.78
4.02 . 02 . 2.16	<i>Layanan Administrasi DPRD</i>	805,044,000.00	804,691,725.00	352,275.00	99.96
4.02 . 02 . 2.16 . 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	805,044,000.00	804,691,725.00	352,275.00	99.96
4.02 . 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	41,072,913,600.00	36,811,707,204.00	4,261,206,396.00	89,62
4.02 . 02 . 2.01	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	2,338,820,000.00	2,087,278,071.00	251,541,929.00	89.24
4.02 . 02 . 2.01 . 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	209,033,000.00	187,561,838.00	21,471,162.00	89.73

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02 . 02 . 2.01 . 02	Pembahasan Rancangan Perda	707,847,000.00	665,219,025.00	42,627,975.00	93.98
4.02 . 02 . 2.01 . 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	105,416,000.00	102,098,000.00	3,318,000.00	96.85
4.02 . 02 . 2.01 . 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1,316,524,000.00	1,132,399,208.00	184,124,792.00	86.01
4.02 . 02 . 2.02	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	46,125,800.00	30,029,000.00	16,096,800.00	65.10
4.02 . 02 . 2.02 . 01	Pembahasan KUA dan PPAS	8,020,000.00	7,092,000.00	928,000.00	88.43
4.02 . 02 . 2.02 . 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8,054,800.00	7,766,000.00	288,800.00	96.41
4.02 . 02 . 2.02 . 03	Pembahasan APBD	12,006,000.00	5,772,000.00	6,234,000.00	48.08
4.02 . 02 . 2.02 . 04	Pembahasan APBD Perubahan	12,006,000.00	4,449,000.00	7,557,000.00	37.06
4.02 . 02 . 2.02 . 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6,039,000.00	4,950,000.00	1,089,000.00	81.97

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02 . 02 . 2.03	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	7,022,741,000.00	5,739,659,590.00	1,283,081,410.00	81.73
4.02 . 02 . 2.03 . 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1,150,012,000.00	952,994,582.00	197,017,418.00	82.87
4.02 . 02 . 2.03 . 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1,575,052,000.00	1,238,538,913.00	336,513,087.00	78.63
4.02 . 02 . 2.03 . 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1,275,526,000.00	979,638,460.00	295,887,540.00	76.80
4.02 . 02 . 2.03 . 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1,030,148,000.00	765,283,869.00	264,864,131.00	74.29
4.02 . 02 . 2.03 . 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1,772,016,000.00	1,590,613,495.00	181,402,505.00	89.76
4.02 . 02 . 2.03 . 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	219,987,000.00	212,590,271.00	7,396,729.00	96.64
4.02 . 02 . 2.04	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	24,163,235,750.00	22,686,265,661.00	1,476,970,089.00	93.89
4.02 . 02 . 2.04 . 02	Pendalaman Tugas DPRD	2,002,399,000.00	1,100,814,875.00	901,584,125.00	54.97

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02 . 02 . 2.04 . 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	21,540,736,000.00	21,080,281,800.00	460,454,200.00	97.86
4.02 . 02 . 2.04 . 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	238,696,700.00	133,302,400.00	105,394,300.00	55.85
4.02 . 02 . 2.04 . 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	314,722,800.00	314,052,336.00	670,464.00	99.79
4.02 . 02 . 2.04 . 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	19,932,000.00	15,750,000.00	4,182,000.00	79.02
4.02 . 02 . 2.04 . 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	46,749,250.00	42,064,250.00	4,685,000.00	89.98
4.02 . 02 . 2.05	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	3,151,839,250.00	3,064,132,000.00	87,707,250.00	97.22
4.02 . 02 . 2.05 . 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	14,400,000.00	750,000.00	13,650,000.00	5.21
4.02 . 02 . 2.05 . 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	41,152,000.00	33,073,500.00	8,078,500.00	80.37
4.02 . 02 . 2.05 . 03	Pelaksanaan Reses	3,096,287,250.00	3,030,308,500.00	65,978,750.00	97.87

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.02 . 02 . 2.06	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	696,175,000.00	512,014,000.00	184,161,000.00	73.55
4.02 . 02 . 2.06 . 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	696,175,000.00	512,014,000.00	184,161,000.00	73.55
4.02 . 02 . 2.07	<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>	13,500,000.00	11,046,000.00	2,454,000.00	81.82
4.02 . 02 . 2.07 . 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	13,500,000.00	11,046,000.00	2,454,000.00	81.82
4.02 . 02 . 2.08	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	3,640,476,800.00	2,681,282,882.00	959,193,918.00	73.65
4.02 . 02 . 2.08 . 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02 . 02 . 2.08 . 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1,895,417,800.00	1,680,466,439.00	214,951,361.00	88.66
4.02 . 02 . 2.08 . 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1,745,059,000.00	1,000,816,443.00	744,242,557.00	57.35

Jika dilihat dari komposisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk pada serapan anggaran telah merealisasikan serapan anggaran hingga mencapai 92,51 %. Kondisi serapan ini sangat dipengaruhi oleh realisasi anggaran pada Kedua Program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kedepannya sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan, Sekretariat DPRD akan lebih mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD yang antara lain :

1. Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang.
2. Melakukan Perencanaan yang benar benar dibutuhkan guna mendukung Tupoksi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk
3. Lebih Optimal dalam menentukan dan Pencapaian Target Kinerja.
4. Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam DPRD menyusun rencana kerja dan penjadwalan kegiatan-kegiatan DPRD.
5. Melakukan kerjasama dengan tenaga ahli dalam pembahasan-pembahasan raperda oleh DPRD baik raperda yang diusulkan oleh eksekutif maupun raperda inisiatif DPRD.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada sistem akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *goodgovernance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dapat dikatakan sebagai berikut :

1. **Indikator Sasaran 1** : *Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, capaian kinerja mencapai Baik masuk kategori berhasil.*
2. **Indikator Sasaran 2** : *Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 75 % dapat dikatakan kurang berhasil atau cukup .* Disebabkan terdapat kendala belum siapnya raperda yang diusulkan oleh pihak eksekutif untuk dilakukan pembahasan serta lamanya fasilitasi pihak Biro Hukum Propinsi Jawa Timur sehingga terlambat dalam Pengesahan.
3. **Indikator Sasaran 3** : *Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% masuk kategori sangat berhasil* dikarenakan usulan-usulan masyarakat yang masuk baik melalui kegiatan reses maupun dari kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama sudah

ditindaklanjuti dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan pencapaian kinerja kegiatan, capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dengan tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar 92,51 %.

Sesuai hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja kegiatan dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan kebijakan selama Tahun Anggaran 2023, dalam penetapan perencanaan kegiatan kedepan seluruh elemen di Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk akan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut :

1. **Indikator Sasaran 1** : *Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, yaitu :*

- a. Peningkatan kompetensi SDM aparatur untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
- c. Meningkatkan Optimalisasi Adminitrasi yang bersifat Pelayanan

2. **Indikator Sasaran 2** : *Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah, yaitu :*

- a. Menyediakan Tim Naskah Akademis yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan Raperda yang akan dibahas
- b. Menyediakan Tim Ahli AKD yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan Raperda yang telah dibahas
- c. Berkoordinasi secara Intens dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Biro Hukum Propinsi Jawa Timur agar Raperda segera difasilitasi agar bisa disahkan menjadi Perda
- d. Memfasilitasi kegiatan Panitia Khusus Raperda untuk melaksanakan Kunjungan kerja dan Konsultasi

3. **Indikator Sasaran 3** : *Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat, yaitu:*

- a. Memanfaatkan Tenaga Ahli Fraksi dalam Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang berasal dari Publik Hearing, Demo, dan Kegiatan Reses

- b. Menyediakan atau Memfasilitasi Jasa Konsultansi dalam Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran agar Pokok-Pokok Pikiran yang diusulkan antara Usulan Masyarakat mengalami Kestinambungan dengan RKPD Kabupaten Nganjuk

Sehingga dapat tercapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang berarti bagi kemajuan dan peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan daerah.

Nganjuk, 15 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK



ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns. M.Kes

Pembina

NIP. 19760804 199703 1 004